

BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



# RENCANA STRATEGIS

BADAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2020-2024



# RENCANA STRATEGIS

BADAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2019-2020



## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 2018





# KATA PENGANTAR

**D**alam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan yang merupakan amanat sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, Badan Ketahanan Pangan (BKP) menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 – 2024 memuat sasaran program, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dan pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun.

Sesuai tugas dan fungsinya Tahun 2020 – 2024 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Program dan kegiatan BKP Tahun 2020-2024 akan dilaksanakan di 34 provinsi dan sekitar 513 kabupaten/kota, fokus pada: (1) Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

dan Stunting; (2) Penguatan Pasokan, Distribusi dan Cadangan Pangan; (3) Pengembangan Diversifikasi dan Industri Pangan Lokal (PIPL); (4) Keamanan dan Mutu Pangan Segar; dan (5) Analisis, Kajian, dan Kebijakan Ketahanan Pangan.

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 – 2024 ini diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat maupun Daerah, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan untuk terwujudnya ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Jakarta,  
Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M. Eng  
NIP. 19610802 198903 1 011





# SEKILAS TENTANG BADAN KETAHANAN PANGAN

**Badan Ketahanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.**



## **TUGAS:**

Menyelenggarakan Koordinasi, Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Diversifikasi dan Pemantapan Ketahanan Pangan.



## **FUNGSI:**

1. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi dan peningkatan keamanan pangan segar.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan,
6. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>SEKILAS TENTANG BADAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>9-14</b>
1.1 Kondisi Umum	11
1.2 Potensi dan Tantangan	13
1.2.1 Potensi	13
1.2.2 Tantangan	14
<b>BAB II TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020-2024</b>	<b>15-19</b>
2.1 Tujuan Badan Ketahanan Pangan	17
2.2 Sasaran Badan Ketahanan Pangan	17
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>20-27</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	21
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	22
1. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan	
2. Strategi Badan Ketahanan Pangan	
3. Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan	
3.3 Kerangka Regulasi	23
3.4 Kerangka Kelembagaan	25
3.5 Kerangka Kelembagaan	25
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>28-30</b>
4.1 Target Kinerja	29
4.2 Kerangka Pendanaan	29
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>31-32</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>33-37</b>





# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari tahun 2015-2019	11
<b>Tabel 2</b> Konsumsi energi dan Protein serta Skor PPh tahun 2015-2019	13
<b>Tabel 3</b> tujuan dan Indikator tujuan Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 (terkait BKP)	17
<b>Tabel 4</b> Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan	18
<b>Tabel 5</b> Arah Kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional Badan Ketahanan Pangan 2020-2024	23
<b>Tabel 6</b> Program dan Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024	24
<b>Tabel 7</b> Program dan Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan tahun 2021-2024	24
<b>Tabel 8</b> Bentuk Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah Seluruh Indonesia tahun 2020	26
<b>Tabel 9</b> Kebutuhan tambahan aSn Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024	26
<b>Tabel 10</b> Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional BKP periode: Juni 2020	27
<b>Tabel 11</b> Indikator Kinerja Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024	29
<b>Tabel 12</b> Alokasi Pendanaan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024	30



# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok dan Strategis 2015-2019	12
<b>Gambar 2</b> Peta Strategi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024	13
<b>Gambar 3</b> Capaian Pemenuhan Pangan tahun 2015-2019	18
<b>Gambar 4</b> Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan	25



# DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Matrik Kinerja dan Pendanaan	34
<b>Lampiran 2</b> Sasaran Konsumsi Pangan tahun 2020-2024	36
<b>Lampiran 3</b> Matrik Kerangka Regulasi	37





# BAB I





# PENDAHULUAN

**P**eran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan permintaan pangan di Indonesia secara merata dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal dan kearifan lingkungan.

Memasuki se-abad Indonesia merdeka pada tahun 2045, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan akan mencapai 318,96 juta jiwa (sumber survei penduduk antar sensus, 2015). Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, termasuk: produktivitas lahan yang mengalami *levelling off*; konversi lahan pertanian; stabilitas harga pangan dunia yang cenderung berfluktuasi; tingginya *food lost* dan *food waste*; pergeseran pola konsumsi pangan ke arah *western diet*, *fast food* dan *industrial food*; serta meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli.

Kebijakan pangan yang dijalankan kedepan akan sangat menentukan apakah Indonesia

mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Badan Ketahanan Pangan (BKP) telah menyiapkan kebijakan dan program untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan selama periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024.

Renstra BKP Tahun 2020-2024 telah mengacu kepada regulasi dan aturan yang berlaku, diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 4) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; serta 5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

## 1.1 KONDISI UMUM

Kinerja ketahanan pangan Indonesia selama periode tahun 2018-2019 semakin membaik yang ditunjukkan kenaikan peringkat *Global Food Security Index (GFSI)*. Berdasarkan hasil kajian yang dirintis oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)* yang

membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Dilihat dari peringkat Indonesia berada pada posisi 65 pada tahun 2018 dan meningkat ke posisi 62 pada tahun 2019 (sumber EIU, 2019).

Meningkatnya posisi ketahanan pangan Indonesia disebabkan karena membaiknya posisi tiga pilar yang membentuknya, yaitu: pilar ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) serta kualitas dan keamanan (*quality and safety*). Capaian posisi ketiga pilar tersebut adalah sebagai berikut: untuk aspek ketersediaan pangan, posisi Indonesia naik dari 58 dengan skor 58,2 pada tahun 2018 menjadi posisi ke-48 dengan skor 61.3 pada tahun 2019; untuk aspek keterjangkauan pangan dari posisi ke-

63 dengan skor 55.2 pada tahun 2018 menjadi posisi ke-58 dengan skor 70,4 pada tahun 2019. Sedangkan untuk aspek kualitas dan keamanan pangan posisi untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tetap di posisi ke-84 namun skor meningkat yaitu mencapai skor 44.5 pada tahun 2018 dan skor meningkat menjadi 47.1 pada tahun 2019.

Kemajuan tersebut juga didukung oleh **pertama**, dari sisi ketersediaan Indonesia telah lebih dari cukup dibandingkan standar kebutuhannya. Ketersediaan energi tahun 2019 sebesar 2.926 kkal/kapita/hari melebihi rekomendasi WNPG tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan untuk ketersediaan protein tahun 2019 sebesar 72.85 gram/kapita/hari melebihi rekomendasi WNPG tahun 2012 sebesar 63,0 gram/kapita/hari (Tabel 1).

**Tabel 1.** Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari tahun 2015-2019

Tahun	Ketersediaan						Skor PPH Ketersediaan
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2015	2.799	178	2.978	59,75	18,53	78,28	81,59
2016	2.825	192	3.016	56,25	19,55	75,79	83,27
2017	2.743	253	2.996	59,22	26,24	85,47	88,92
2018*	2.807	275	3.110	57,92	30,87	89,82	92,13
2019**	2.705	221	2.926	53,17	19,68	72,85	84,49

\*) Sementara \*\*) Sangat Sementara

**Sumber :** Neraca Bahan Makanan

**Kedua**, harga pangan menjadi salah satu indikator keterjangkauan pangan masyarakat. Harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan agar produsen dan

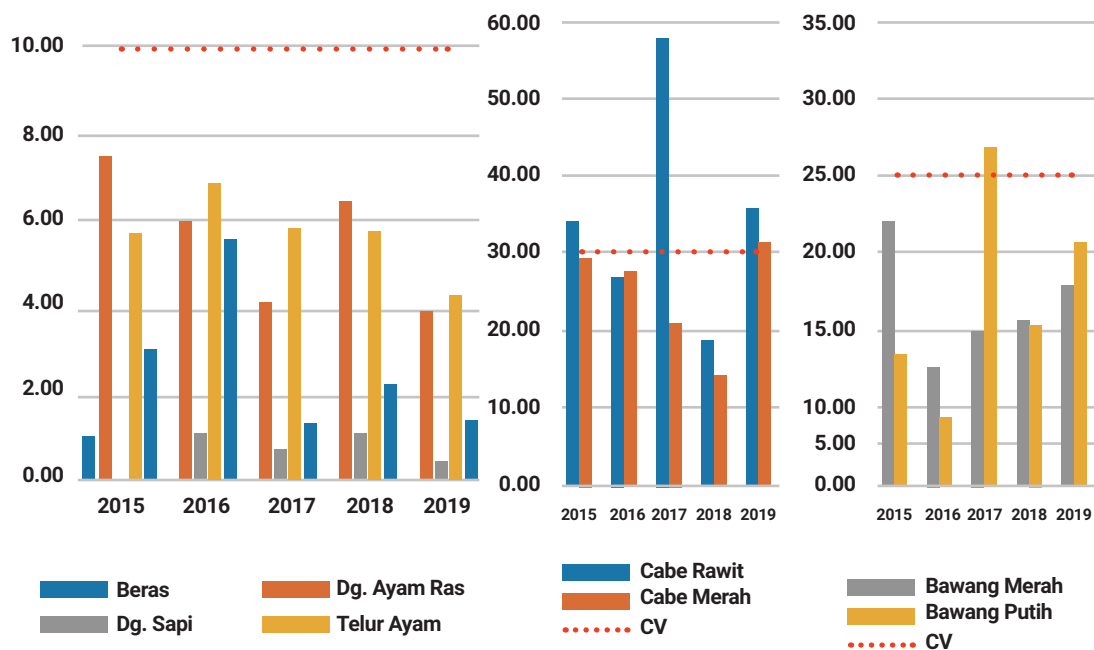
konsumen tidak dirugikan. Di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dan disisi lain konsumen juga harus mendapatkan harga beli yang wajar untuk mendukung daya beli dan keterjangkauan untuk dapat mengakses pangan. Secara umum pergerakan harga



pangan pokok dan strategis dalam kondisi aman dan stabil.

Meskipun dinamika kenaikan dan penurunan harga pangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena terbentuk dari mekanisme pasar, pemerintah tetap berkepentingan untuk menjaga agar kenaikan dan penurunan harga tersebut tetap terkendali agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

perekonomian dan ketahanan pangan. Dalam gambar 1, nilai CV harga beras, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng dan gula pasir berada dibawah 10%. Demikian pula dengan bawang merah dan bawang putih pada umumnya stabil yang ditandai dengan nilai CV dibawah 25%. Komoditas yang relatif fluktuatif adalah cabai merah dan cabai rawit merah dimana nilai CV kedua komoditas ini tercatat di atas 30% pada tahun 2015, 2017 dan 2019.



Sumber : Panel Harga Pangan (diolah BKP)

Gambar 1. Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok dan Strategis 2015-2019

**Ketiga**, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah variabel yang menggambarkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan berdasarkan perhitungan BKP persentase prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan hasil perhitungan BPS menurun dari 10,73 persen pada tahun 2015 menjadi 7,66 persen pada tahun 2019.

Secara nasional konsumsi energi dan protein penduduk telah melebihi Angka Kecukupan yang dianjurkan, yaitu konsumsi energi dan

protein per kapita per hari secara rata-rata melebihi 100 persen dari angka kecukupan gizi (AKG) (Tabel 2). Dalam kurun waktu 2015 - 2018, total konsumsi energi dan protein yang diperoleh dari berbagai jenis kelompok pangan, menunjukkan kecenderungan yang meningkat namun sedikit menurun pada tahun 2019. Konsumsi protein rata-rata penduduk sudah melebihi anjuran kecukupan gizi, namun masih didominasi oleh protein nabari yang berasal dari pangan sumber karbohidrat khususnya sereal.

**Tabel 2.** Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2015-2019

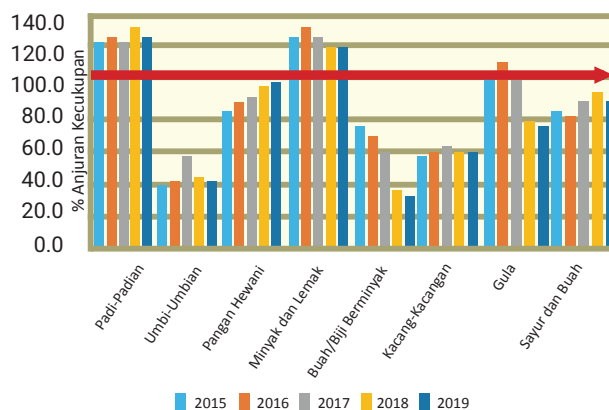
Uraian	Konsumsi Pangan dan Protein per Kapita per Hari				
	2015	2016	2017	2018	2019
Energi (kkal)	2.099	2.147	2.128	2.165	2.138
Protein (gram)					
Nabati	40.06	40.95	40.59	42.66	41.81
Hewani	18.50	19.30	20.86	20.25	21.05
Skor PPH	85.2	86.0	90.4	91.3	90.8

Sumber : Susenas 2015-2019, BPS, diolah BKP  
 \*) Keterangan : Data Sementara

Pemenuhan konsumsi pangan juga harus memperhatikan keberagaman jenis (diversifikasi) dan jumlah pangan yang dikonsumsi penduduk sesuai anjuran. Kearagaman konsumsi pangan yang ditunjukkan melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pencapaian skor PPH tahun 2019 sebesar 90.8 (berdasarkan AKE 2000 kkal/kap/hari). Namun bila dilihat menurut kelompok pangan, kontribusi konsumsi kelompok umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah, serta buah/biji berminyak masih perlu ditingkatkan, sedangkan untuk konsumsi pangan kelompok padi-padian, gula, minyak dan lemak telah melebihi anjuran (Gambar 3).

**Keempat,** pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan semakin diperkuat untuk menjamin pangan yang aman dan sehat bagi masyarakat Indonesia sesuai Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sistem keamanan pangan segar telah terbangun melalui pendataan, pendaftaran dan sertifikasi serta pembagian kewenangan antara pusat, propinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini

**Capaian Pemenuhan Pangan Tahun 2015-2019\***



**Gambar 2.** Capaian Pemenuhan Pangan Tahun 2015-2019

Sumber Susenas 2015-2019-BPS, diolah BKP 2019  
 \*Keterangan Tahun 2019 angka sementara

sangat bermanfaat bagi masyarakat selaku konsumen dalam memilih pangan segar yang aman yaitu pangan yang memiliki nomor registrasi atau sertifikasi.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1.2.1 Potensi

Sebagai salah satu negara mega *biodiversity* dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

Indonesia memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternatif yang cukup



besar dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti: singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah bahkan melebihi beras.

Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi *labor supply* dalam pembangunan pangan. Sampai saat ini lebih dari 35,7 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perlu untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah akan berdampak memperkuat aspek ketersediaan, cadangan dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting.

Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (vertikal dan horisontal) baik antar instansi atau antar lembaga terkait, maupun antara pemerintah dengan petani, pedagang dan peneliti.

### 1.2.2 Permasalahan

Pembangunan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan baik dari sisi *supply* (penyediaan) dan sisi *demand* (permintaan) pangan, penjabarannya sebagai berikut:

1. *Supply* (penyediaan), berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu:
  - a. Produksi
    - 1) Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
    - 2) Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usahatani kecil disertai laju konversi lahan yang cukup tinggi.

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.
- 4) Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman belum dilaksanakan secara masif.
- 5) Regenerasi petani berjalan lambat.
- 6) Tingginya *food loss and waste*.

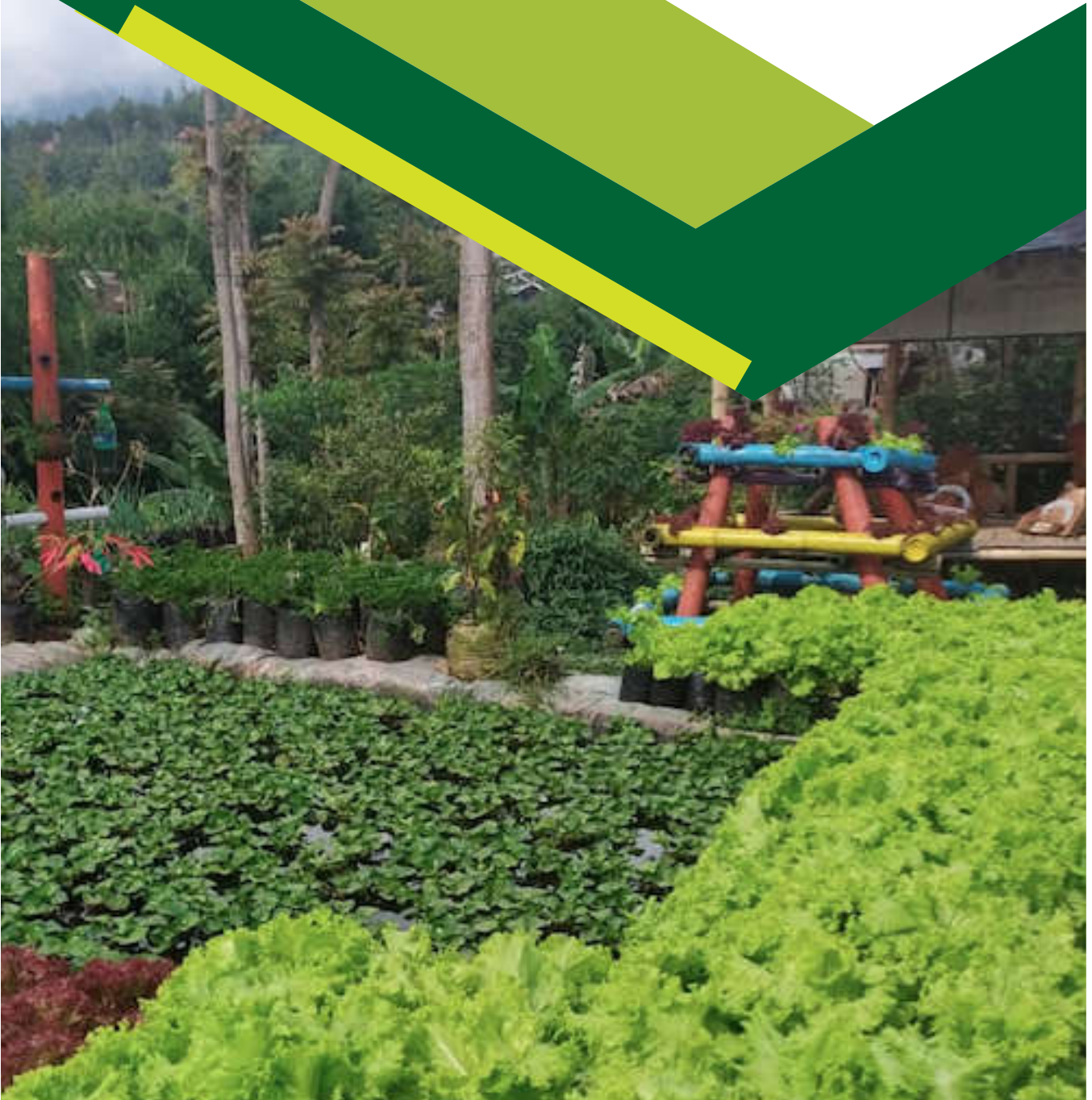
#### b. Distribusi

- 1) Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil).
- 2) Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
- 3) Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan hanya searah dari produsen ke konsumen.
- 4) Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

#### 2. *Demand* (permintaan), berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu:

- a. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi
- b. Keamanan pangan akibat penggunaan bahan berbahaya dan/atau bahan kimia berbahaya pada makanan. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
- c. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
- d. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsinya
- e. *Triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia.

# BAB II





## TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020-2024

**V**isi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi. Misi tersebut dikenal sebagai nawacita kedua yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan nawacita pertama. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

BKP mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu **Mewujudkan Ketahanan Pangan**.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai



perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap

kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

### 2.1 Tujuan Badan Ketahanan Pangan

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan Kementerian Pertanian, kontribusi BKP pada Tujuan 1 “Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan” dan Tujuan 3 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” (Tabel.2). Kedua tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih detail ke dalam Sasaran Program. Lebih rinci mengenai Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan akan dijelaskan lebih lanjut.

**Tabel 3.** Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (terkait BKP)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	
			2020	2024
1	Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	1 Global Food Security Index/GFSI	62.6	69.8
		2 Skor Pola Pangan Harapan	90.4	95.2
		3 Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/kapita/hari)	2.1	2.1
		4 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gr/kapita/hari)	57	57
		5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalensi of Undernourishment/ PoU (%)	6.2	5
		6 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5.2	4
		7 Ketersediaan Beras (Juta ton)	39.2	46.8
		8 Ketersediaan protein hewani (Juta ton)	2.5	2.9
		9 Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% penerima BPNT)	10-20%	100%
		10 Persentase pangan organik	5%	20%
2	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	79.96	82.96
		2 Opini BPK RI	WTP	WTP

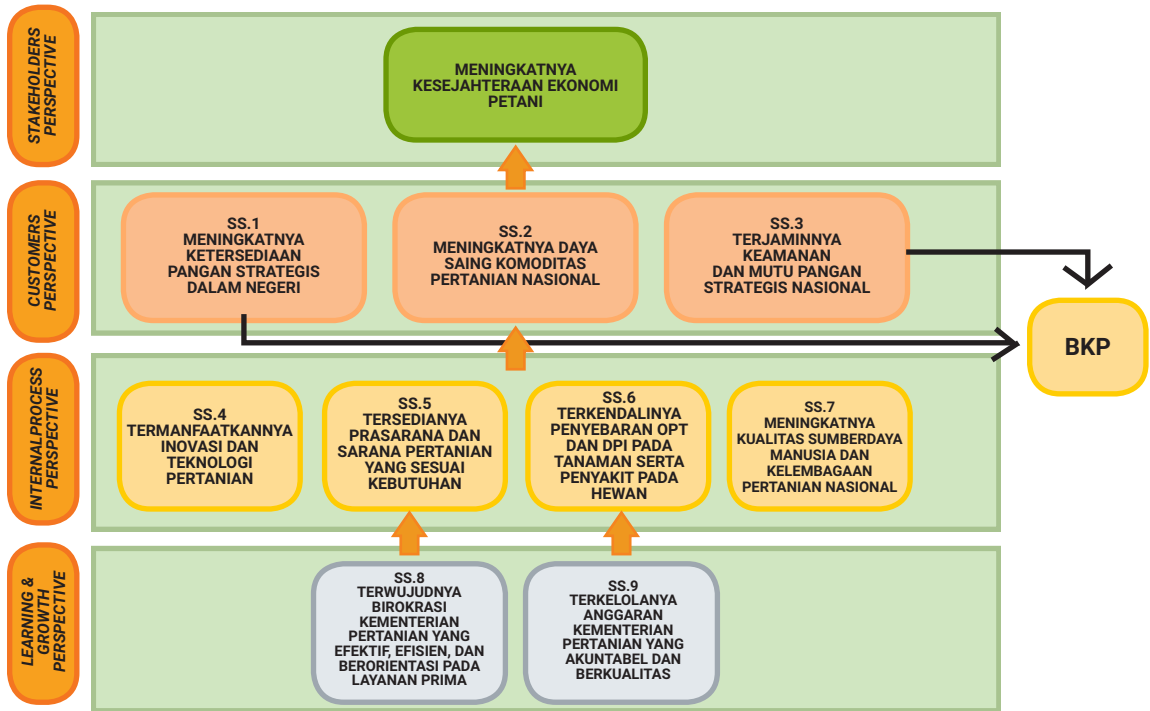
### 2.2 Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Perumusan sasaran program Badan Ketahanan Pangan merupakan penerjemahan dari

Tujuan Badan Ketahanan Pangan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang disusun dengan metode *Balanced ScoreCard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process* dan *learning and growth perspective* adalah:





Gambar 3. Peta Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian di atas, kontribusi Badan Ketahanan Pangan pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri” dan Sasaran Strategis 3 “Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional”. Sasaran strategis ini berada pada *customer perspective* yang berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani” pada *stakeholders perspective*.

Dengan kata lain, *outcome* Kementerian Pertanian berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan peran serta dari program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan koridor tersebut, dirumuskan sebanyak 6 (enam) Sasaran Program yang capaiannya diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja Sasaran Program.

Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target		
			Sasaran Program	2020	2024		
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	1	Meningkatnya Penjualan Beras Kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	1	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI (%)	20	20
		2	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	18	10

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target		
			Sasaran Program		2020	2024	
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	3	Persentase PSAT Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)	85	85
				4	Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak	4	Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kapita/hari)
		5	Konsumsi Daging (kg/kapita/hari)			13.5	14.7
		6	Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kapita/hari)			10.65	11.04
3	Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	5	Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan Yang Efektif dan Efisien	7	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Ketahanan Pangan (nilai)	23.62	24.51
4	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6	Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan Yang Akuntabel dan Berkualitas	8	Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan (nilai)	89.44	89.48

Indikator kinerja sasaran program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran program Badan Ketahanan Pangan dengan targetnya dijelaskan dalam Target Kinerja (Bab IV) Renstra Badan Ketahanan Pangan 2020-2024. Indikator Program sebagai rumusan

dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra).



# BAB III





# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

**P**ertanian maju, mandiri dan modern diarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan berdaya saing. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas pangan yang beragam, bergizi dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua.

Pembangunan pertanian pada Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pertanian. Untuk itu telah ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian

3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
4. Meningkatnya kualitas SDM pertanian
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Badan Ketahanan Pangan berkontribusi pada arah kebijakan 1 "Terjaganya ketahanan pangan nasional".

Penjabaran dari arah kebijakan diatas telah ditentukan strategi Kementerian Pertanian yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional



### 3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

#### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024 adalah: Pemantapan Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan berbasis pangan lokal; (b) penanganan akses pangan secara fisik dan ekonomi; dan (c) penanganan daerah rentan rawan pangan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (b) penguatan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, dan (b) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

Strategi yang akan dilakukan untuk mendukung arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan untuk pemantapan ketahanan pangan dijelaskan pada Tabel 5 dibawah ini.



Strategi yang akan dilakukan untuk mendukung arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan untuk pemantapan ketahanan pangan dijelaskan pada Tabel 5 dibawah ini.

**Tabel.5.** Arah Kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional Badan Ketahanan Pangan 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi	Langkah Operasional
Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan	1 Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan	1 Pemberdayaan masyarakat di daerah rentan rawan pangan melalui kegiatan aksi Badan Ketahanan Pangan
	2 Menjaga stabilitas pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan	2 Penajaman analisis ketersediaan, kebutuhan komoditas pangan strategis nasional dan indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi
	3 Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah	3 Peningkatan kemampuan dan jumlah kelembagaan distribusi dan cadangan pangan
	4 Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	4 Analisis pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen
	5 Pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 Pengembangan industri pangan lokal
	6 Pelaksanaan reformasi birokrasi	6 Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan
		7 Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
		8 Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan
		9 Penguatan Birokrasi Institusi Badan Ketahanan Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

### 3.3 Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan, maka program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi adalah **“Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat”**. Program

tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.



**Tabel 6.** Program dan Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Penjualan Beras Kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
		Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
		Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak	
		Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan Yang Efektif dan Efisien	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
		Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan Yang Akuntabel dan Berkualitas	

Setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja (*key performance indicator*) yang melekat dalam setiap sasaran program dan kegiatannya. Kegiatan dan indikatornya tersaji secara lengkap dalam lampiran.

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (*redesign*) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/Lembaga. Dengan adanya perancangan kembali (*redesign*) tersebut maka sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 akan berubah yang semula 12

program menjadi 5 program, yaitu:

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
2. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
3. Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Dukungan Manajemen

Badan Ketahanan Pangan mendukung pada Program 2 “Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas” dan Program 5 “Dukungan Manajemen”

**Tabel 7.** Program dan Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2024

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan
1	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Meningkatnya Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
		Meningkatnya Pengawasan Pangan Segar yang beredar	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



No	Program	Sasaran Program	Kegiatan
2	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
		Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel dan Berkualitas	

Perubahan program ini akan berdampak dalam perubahan susunan sasaran program, kegiatan dan indikatornya dalam matriks target kinerja 2021-2024 terlampir.

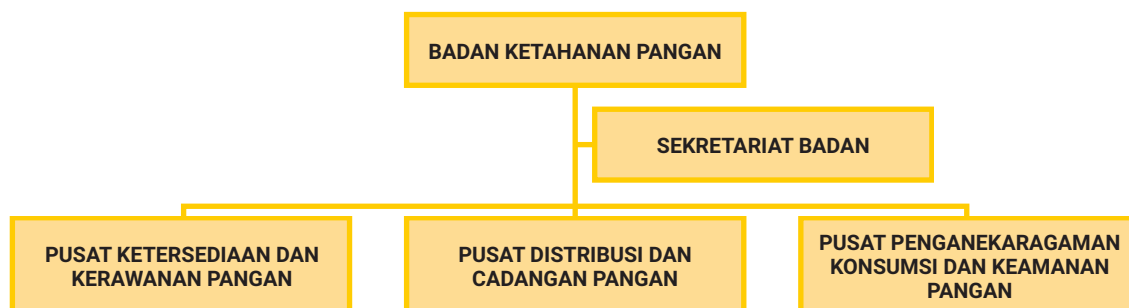
### 3.4 Kerangka Regulasi

Regulasi yang mendukung pembangunan pangan adalah: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Pertanggal 04 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2020 Pertanggal 6 Maret 2020 tentang Komando Strategis Penggilingan Padi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian; Permentan tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; Permentan tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran

Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian; SK Kepala BKP tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Program; serta SK Kepala BKP tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Melalui Bantuan Pemerintah.

### 3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Badan Ketahanan Pangan merupakan salah satu organisasi dalam Kementerian Pertanian. Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.



Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan



Badan Ketahanan Pangan menerapkan tata kelola manajemen yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

Pembaruan dan perubahan pelaksanaan pembangunan pangan ke depan dimulai dari lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional yang dinamis. Untuk itu dituntut kinerja kelembagaan ketahanan pangan yang handal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kelembagaan pangan daerah masih sangat beragam, seperti terlihat pada Tabel 6.

**Tabel 8.** Bentuk Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2020

No	Nama Lembaga	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Dinas Pangan/ Ketahanan Pangan	22	283	305
2	Dinas Pangan/ Ketahanan Pangan bergabung dengan Dinas Urusan Pertanian	12	141	154
3	Dinas Pangan/ Ketahanan Pangan bergabung dengan Dinas Urusan Lainnya	-	87	87
4	Belum Terdata		9	9

**Sumber :** BKP (31 Desember 2019), Kementan

**Catatan :** Belum terdata/belum ada Perda (Kab Asmat, Deiyai, Mimika, Pegunungan Bintang, Maybrat, Puncak, Membramo Tengah).

Era desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan kerja antara pusat dengan daerah adalah hubungan fungsional dalam pembangunan pangan. Untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program perlu memperkuat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dibentuk secara berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Peran serta masyarakat dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam mendukung pencapaian target pembangunan pangan juga perlu diperkuat.

penyetaraan 43 (empat puluh tiga) jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan ini ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja organisasi.

Penyederhanaan birokrasi sesuai pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 menjadi 2 (dua) level eselonisasi di Badan Ketahanan Pangan, akan dilakukan

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh 282 orang. Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sesuai peta jabatan yang ideal berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada aplikasi e-formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB untuk kebutuhan pegawai di Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024 seperti pada Tabel 7.

**Tabel 9.** Kebutuhan Tambahan ASN Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
(orang)					
144	162	187	208	-	Data e-formasi kebutuhan pegawai per tahun

Dalam rangka meningkatkan pelayanan ASN telah dilakukan: 1) pembinaan, evaluasi dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja; 2) penyusunan, evaluasi dan penyempurnaan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, 3) penyusunan rencana kebutuhan pegawai, 4) perencanaan pengembangan pegawai,

5) pembinaan disiplin pegawai, 6) evaluasi kinerja pegawai, dan 7) pelaksanaan urusan mutasi pegawai.

Saat ini Badan Ketahanan Pangan didukung oleh 83 pejabat fungsional sebagaimana tabel 8.

**Tabel 10.** Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional BKP periode: Juni 2020

No	Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pustakawan	0	1	1
2	Pranata Komputer	1	1	2
3	Arsiparis	2	5	7
4	Statistisi	1	3	4
5	Analisis Kepegawaian	0	3	3
6	Perencana	0	1	1
7	Perancang Peraturan PerUndang-Undangan	0	1	1
8	Pranata Humas	2	2	4
9	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	3	7	10
10	Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)	3	7	10
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	0	1
12	Analisis Ketahanan Pangan	13	26	39
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>57</b>	<b>83</b>



# BAB IV





## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. TARGET KINERJA

**T**arget kinerja Badan Ketahanan Pangan 2020-2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2020-2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran program memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja program Badan Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja tersebut kemudian di turunkan (*cascading*) ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih merinci lagi, sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Badan Ketahanan Pangan secara rinci disajikan pada Tabel 9, sedangkan setiap indikator sasaran kegiatan tertuang dalam matrik target kinerja pada lampiran Renstra ini.

**Tabel 11.** Indikator Kinerja Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/ TTI (%)	20	20	20	20	20
2	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	18	16	14	12	10
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)	85	85	85	85	85



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak	Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kapita/hari)	260,2	273,2	286,9	301,3	316,3
		Konsumsi Daging (kg/kapita/tahun)	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7
		Konsumsi Protein Asal Ternak (gr/kapita/hari)	10,65	10,75	10,85	10,94	11,04
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Ketahanan Pangan (nilai)	23,62	23,84	24,07	24,29	24,51
6.	Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan (nilai)	89,44	89,45	89,46	89,47	89,48

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional, maka Badan Ketahanan Pangan membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Sumber pendanaan yang sangat besar tersebut perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diluar APBN, diantaranya Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Kota, keterlibatan swasta/BUMN/

BUMD serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan internasional. Dukungan anggaran tersebut akan digunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan khususnya ketahanan pangan masyarakat pada daerah rentan rawan pangan dan daerah stunting. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam lampiran.

**Tabel 12.** Alokasi Pendanaan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024.

No	Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	238.207	332.157	424.315	542.796	654.716
2	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	52.55	80.256	129.683	129.455	182.997
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	265.216	298.352	406.755z	445.354	544.66
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	107.591	112.97	118.619	124.545	130.777
<b>TOTAL</b>		<b>663.564</b>	<b>813.735</b>	<b>1.079.372</b>	<b>1.295.697</b>	<b>1.566.555</b>

Secara lengkap target dan anggaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2020-2024

ditampilkan pada Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024.

# BAB V





## PENUTUP

**U**ntuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi, dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan agar diperoleh hasil yang optimal. Sebagai bentuk komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat perlu diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka terwujudnya ketahanan pangan nasional dilakukan dengan responsif gender.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan dapat dijadikan acuan untuk penyusunan program dan kegiatan ketahanan pangan dan gizi.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.





# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1

### MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan/Output/Sub Output	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Lokasi
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>				
	Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)			
	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI	%		
	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan			
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%		
	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			
	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%		
	Meningkatnya konsumsi sayur, buah, daging dan protein asal ternak			
	Konsumsi Sayur dan Buah	gr/kapita/hari	244,3	
	Konsumsi daging	Kg/kapita/tahun	13,2	
	Konsumsi protein asal ternak	gr/kapita/hari	10,9	
	Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang efektif dan efisien			
	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Ketahanan Pangan	Nilai	23,18	
	Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan yang Akuntabel dan Berkualitas			
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan	Nilai	89,43	
<b>Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</b>				
	Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)			Pusat
	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI	%		
	Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)			Pusat
	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI	%		
	Lembaga Distribusi Pangan	Unit		Daerah
	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Unit		Daerah
	Informasi distribusi, harga dan cadangan pangan	Lokasi		Pusat, Daerah
<b>Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan</b>				
	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan			Pusat
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%		
	Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan	Lokasi		Daerah
	• Pengembangan Pertanian Keluarga/Family Farming	Lokasi		Daerah
	• Pertanian Masuk Sekolah	Lokasi		Daerah
	• Pengembangan Korporasi Usahatani	Lokasi		Daerah
	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Lokasi		Pusat, Daerah
	Pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan	Lokasi		Pusat, Daerah
<b>Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>				
	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			Pusat
	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%		
	Meningkatnya konsumsi sayur, buah, daging dan protein asal ternak			Pusat
	Konsumsi Sayur dan Buah	gr/kapita/hari	244,3	
	Konsumsi daging	Kg/kapita/tahun	13,2	
	Konsumsi protein asal ternak	gr/kapita/hari	10,9	
	Pekarangan Pangan Lestari	Lokasi		Daerah
	Pekarangan Pangan Lestari Stunting	Lokasi		Daerah
	Pengembangan Industri Pangan Lokal Berbasis UMKM (PIPL1000)	Lokasi		Pusat, Daerah
	Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Lokasi		Pusat, Daerah
	Percepatan penganeekaragaman konsumsi panga	Lokasi		Pusat, Daerah
<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan</b>				
	Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			Pusat
	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Ketahanan Pangan	Nilai	23,18	
	Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan yang Akuntabel dan Berkualitas			Pusat
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan	Nilai	89,43	
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan			Pusat
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	Skala Likert		
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan		Pusat, Daerah
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan		Pusat
	Layanan Internal (Overhead)	Layanan		Pusat
	Layanan Perkantoran	Layanan		Pusat

	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
						663.564	813.735	1.079.372	1.295.697	1.566.555	BADAN KETAHANAN PANGAN (BKP)
							762.564	877.564	1.008.564	1.160.564	
20	20	20	20	20	20	763.564					
18	16	14	12	10							
85	85	85	85	85							
260,2	273,2	286,9	301,3	316,3							
13,5	13,8	14,1	14,4	14,7							
10,65	10,75	10,85	10,94	11,04							
23,62	23,84	24,07	24,29	24,51							
						28820700					
89,44	89,45	89,46	89,47	89,48	37.744.992,08						
					238.207	332.157	424.315	542.796	654.716	Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan	
20	20	20	20	20	0						
20	20	20	20	20	0						
962	1000	1000	1000	1000							
300	220	220	220	225							
35	35	35	35								
					52.550	80.256	129.683	129.455	182.997	Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
18	16	14	12	10	0						
962	1000	1000	1000	1000							
727	646	565	485	404							
340	340	340	340	340							
13	0	0	0	0							
389	135	135	135	135							
35	35	35	35								
					265.216	298.352	406.755	445.354	544.660	Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	
85	85	85	85	85							
260,2	273,2	286,9	301,3	316,3	0						
13,5	13,8	14,1	14,4	14,7							
10,65	10,75	10,85	10,94	11,04							
2231	2000	2000	2500	2500							
1369	1000	1000	500	500							
35	35	35	35	35							
35	35	35	35	35							
35	35	35	35	35							
					107.591	112.970	118.619	124.545	130.777	Sekretariat Badan Ketahanan Pangan(BKP)	
23,62	23,84	24,07	24,29	24,51							
89,44	89,45	89,46	89,47	89,48							
3,01	3,02	3,03	3,04	3,05							
1	1	1	1	1							
1	1	1	1	1							
1	1	1	1	1							
1	1	1	1	1							



## LAMPIRAN 2

### SASARAN KONSUMSI PANGAN TAHUN 2020-2024

Kelompok Pangan	Gram/Kapita/Hari					Kg/Kapita/Tahun					Ton/Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PADI-PADIAN</b>															
Beras	256.4	249.0	241.8	234.6	227.4	93.6	90.9	88.2	85.6	83.0	25,363,826	24,903,788	24,427,378	23,934,899	23,426,645
Jagung	6.0	7.4	8.5	9.9	11.2	2.2	2.7	3.1	3.6	4.1	596,346	739,758	858,149	1,006,479	1,157,211
Terigu	48.0	46.7	45.3	44.0	42.6	17.5	17.0	16.5	16.0	15.6	4,753,338	4,667,124	4,577,842	4,485,548	4,390,298
<b>UMBI-UMBIA</b>															
Singkong	28.2	32.4	36.7	40.8	45.0	10.3	11.8	13.4	14.9	16.4	2,792,124	3,245,118	3,703,782	4,167,745	4,636,612
Ubi Jalar	11.3	13.0	14.7	16.4	18.1	4.1	4.8	5.4	6.0	6.6	1,119,995	1,301,702	1,485,685	1,671,792	1,859,867
Kentang	9.4	10.8	12.2	13.6	15.0	3.4	3.9	4.5	5.0	5.5	928,976	1,079,693	1,232,297	1,386,664	1,542,662
Sagu	1.9	3.0	4.1	5.2	6.3	0.7	1.1	1.5	1.9	2.3	189,746	301,383	415,233	531,197	649,167
Umbi Lainnya	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	185,489	215,583	246,054	276,876	308,024
<b>PANGAN HEWANI</b>															
Daging ruminansia	10.6	10.6	10.6	10.7	10.7	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	1,045,983	1,060,429	1,074,696	1,088,769	1,102,632
Daging unggas	20.9	20.9	21.0	21.1	21.1	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	2,065,296	2,093,819	2,121,989	2,149,776	2,177,149
Telur	20.0	20.1	20.1	20.2	20.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	1,980,666	2,008,021	2,035,037	2,061,685	2,087,936
Susu	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	815,414	826,676	837,798	848,769	859,576
Ikan	59.6	59.8	59.9	60.1	60.3	21.7	21.8	21.9	21.9	22.0	5,894,132	5,975,536	6,055,930	6,135,231	6,213,350
<b>MINYAK DAN LEMAK</b>															
Minyak Kelapa	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	185,931	184,718	183,417	182,028	180,553
Minyak Sawit	24.1	23.7	23.3	22.9	22.5	8.8	8.6	8.5	8.3	8.2	2,384,258	2,368,704	2,352,022	2,334,219	2,315,297
Minyak Lainnya	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	95,939	95,314	94,642	93,926	93,165
<b>BUAH/BIJI BERMINYAK</b>															
Kelapa	4.0	4.8	5.5	6.3	7.1	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6	397,532	478,568	560,657	643,732	727,724
Kemiri	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	75,938	91,418	107,099	122,969	139,013
<b>KACANG-KACANGAN</b>															
Kedele	26.4	28.6	30.8	33.0	35.2	9.6	10.5	11.3	12.1	12.9	2,614,714	2,864,400	3,116,808	3,371,729	3,628,941
Kacang Tanah	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	97,510	106,821	116,234	125,741	135,333
Kacang Hijau	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	129,645	142,025	154,540	167,180	179,933
Kacang lainnya	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	67,369	73,802	80,305	86,873	93,500
<b>GULA</b>															
Gula Pasir	19.8	20.6	21.4	22.2	23.0	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	1,954,692	2,057,217	2,160,527	2,264,535	2,369,147
Gula Merah	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	177,618	186,934	196,321	205,772	215,278
<b>SAYUR DAN BUAH</b>															
Sayur	155.0	157.4	159.7	162.1	164.5	56.6	57.4	58.3	59.2	60.0	15,334,031	15,736,593	16,139,356	16,541,957	16,943,997
Buah	96.7	98.2	99.7	101.2	102.7	35.3	35.8	36.4	36.9	37.5	9,570,687	9,821,944	10,073,328	10,324,610	10,575,542
<b>LAIN-LAIN</b>															
Minuman	104.2	103.9	103.6	103.3	103.1	38.0	37.9	37.8	37.7	37.6	10,314,033	10,393,842	10,470,954	10,545,276	10,616,702
Bumbu	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	939,295	946,563	953,585	960,354	966,858
<b>Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)</b>											<b>271,066,400</b>	<b>273,984,400</b>	<b>276,822,300</b>	<b>279,577,400</b>	<b>282,246,600</b>

#### Keterangan :

1. Proyeksi dengan baseline tahun 2019 (86.4) dan capaian skor PPH per tahun 2020 (90.4); tahun 2021 (91.6); tahun 2022 (92.8); tahun 2023 (94.0) dan tahun 2024 (95.2) sesuai target pada RPJMN 2020-2024
2. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS dan Bappenas (2013)

**LAMPIRAN 3**  
**MATRIK KERANGKA REGULASI**

Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
Perpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi	Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Peraturan Presiden tersebut berlaku untuk jangka waktu tahun 2017-2019 dan selanjutnya KSPG ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan Keputusan Presiden Nomor 5 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020 amanatkan untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi	Badan Ketahanan Pangan	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020









**BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Harsono RM No. 3,  
Ragunan, Pasar Minggu 12550  
Phone : (021) 7805035, 7805641  
Fax : (021) 78846536  
Website : [bkp.deptan.go.id](http://bkp.deptan.go.id)

